

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025–2026



**DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MEMPAWAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mempawah, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah

Drs. ASV/N. AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196802031989031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1. Latar belakang 1

 1.2. Dasar hukum penyusunan..... 2

 1.3. Maksud dan tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.. 7

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 19

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan
 Perangkat Daerah..... 25

 2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Perangkat Daerah 27

 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dalam RPJPD Kabupaten
 Mempawah Tahun 2005-2025 33

 3.3. Telaahan Renstra KL/ dan Renstra 35

 3.4. Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan
 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36

 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.. 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 5.1. Strategi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Mempawah..... 39

 5.2. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Mempawah..... 39

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN
 PENDANAAN

6.1.	Rencana Program dan Kegiatan.....	41
6.2.	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		55
BAB VIII PENUTUP		63
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan dan Lingkungan Hidup yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan dan Lingkungan Hidup, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025– 2026, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi dan Lingkungan Hidup maupun pengelolaan sarana perhubungan serta lingkungan hidup.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan lingkungan hidup yang berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Mempawah. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen

organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dalam menentukan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275 diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu dua tahun;

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra KL/ dan Renstra
- 3.4. Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

5.2. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Mempawah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN
PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Tugas

Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja tersebut, maka struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 84 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada bagan struktur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Program kerja di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Perumusan Kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan dan lingkungan hidup sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
Sub Bagian Umum dan Aparatur;
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Bidang Perhubungan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
Seksi Lalu lintas dan Angkutan;
Seksi Sarana Prasarana;
Bidang Lingkungan Hidup;
Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
Unit Pelaksana Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional;

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup baik segi teknis operasional maupun administrative sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

Penetapan program kerja di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- b. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum, aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan, data dan kehumasan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
- i. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Penyiapan bahan pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perhubungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perhubungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bidang Perhubungan membawahi:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana.

Seksi Lalu lintas dan angkutan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan;

- d. Penyusunan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- e. Pengelolaan bahan penyusunan master plan jaringan perkeretaapian;
- f. Penyiapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penyiapan bahan penetapan lokasi terminal penumpang type C dan lokasi terminal barang;
- h. Penyiapan bahan pengaturan penggunaan terminal penumpang dan terminal barang;
- i. Penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan;
- j. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota;
- k. Penyiapan bahan penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan;
- l. Penyelenggaraan penerbitan izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal;
- m. Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- n. Penyelenggaraan penerbitan izin pelayanan parkir;
- o. Penyiapan bahan penerbitan angkutan sungai dan danau ukuran tonase kotor sama dengan atau lebih 7 ton ($GT \geq 7$);
- p. Penyiapan bahan penetapan tarif jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- q. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- r. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- s. Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- t. Penyiapan bahan penetapan jaringan trayek sungai di Kabupaten;
- u. Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi / non ekonomi dalam Kabupaten;
- v. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- w. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- x. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

- y. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- z. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan.

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan. Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
- f. Penyiapan pembangunan fasilitas parkir;
- g. Penyiapan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- i. Penyiapan pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian;
- j. Penyelenggaraan penerbitan izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Penyelenggaraan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DRKP pelabuhan pengumpan lokal;
- l. Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;
- m. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana;
- n. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- o. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- p. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan.

Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan program perencanaan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. Pelaksanaan program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- i. Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- j. Pelaksanaan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- k. Pelaksanaan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- l. Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- m. Pelaksanaan program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- n. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup;
- p. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diberikan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, dipimpin oleh seorang kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

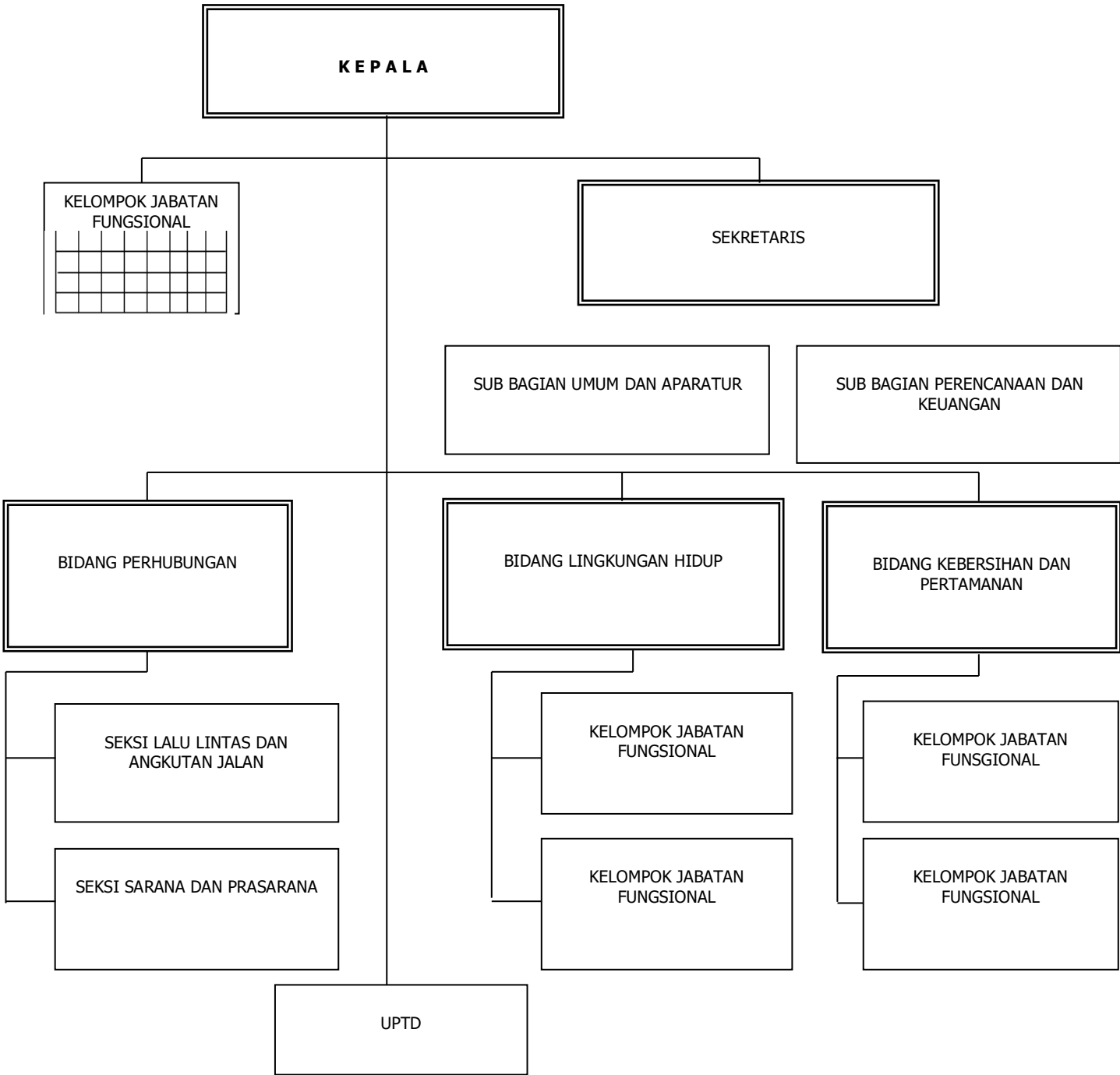
- a. Penyusunan program kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. Pengelolaan dan penataan kebersihan dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan penanganan sampah;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang kebersihan dan pertamanan;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan;
- j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kebersihan dan pertamanan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan.

Unit Pelaksana Teknis, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan fungsional, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

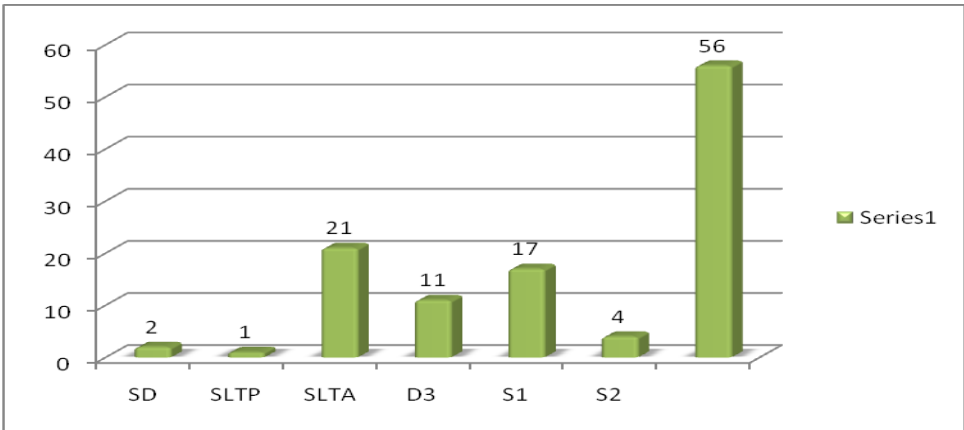
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 56 orang yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Eselon/Non Eselon, Golongan dan Pendidikan
Di Lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Tahun 2023

No	Eselon/Non Eselon	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	II	-	-	-	1	1
2	III	-	-	2	2	4
3	IV	-	-	5	-	5
Sub Jumlah		-	-	7	3	10
4	Non Eselon	2	23	21	-	46
Jumlah		2	23	28	3	56

Sumber :Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Januari 2023

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2023

2.2.2 Kondisi Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana

pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
sebagaimana Tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2
Aset Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah
Tahun 2023

No	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Ex Unit Perhitungan LL dan Angkutan Jalan)	1.100	M2	Baik
2	Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Bis Sungai Pinyuh)	3.232	M2	Baik
3	Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Non Bis Jungkat)	2.000	M2	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pusat Kuliner)	3.580	M2	Baik
5	Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Bis Mempawah)	6.000	M2	Baik
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung Kantor DISHUBLH)	4.550	M2	Baik
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung PKB)	8.440	M2	Baik
8	Air Conditioner (AC)	34	Buah	Baik (29 unit) Rusak Berat (5 Unit)
9	Kursi Tunggu	2	Set	Baik
10	Kursi Tamu	2	Set	Baik
11	Kursi Kerja	38	Buah	Baik
12	Kursi Kerja Eselon	9	Buah	Baik
13	Rilling Besi	19	Buah	Baik
14	Lemari Besi	11	Buah	Baik
15	Lemari Kayu	23	Buah	Baik
16	Meja	42	Buah	Baik
17	Meja Kerja Pejabat	5	Buah	Baik
18	Laptop	6	Unit	Baik
19	Personal Computer (PC)	13	Unit	Baik
20	Printer	14	Unit	Baik
21	Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	Baik
22	Kendaraan Dinas Operasional (Mini Bus)	2	Unit	Baik
23	Kendaraan Dinas Operasional (Pick Up)	1	Unit	Baik
24	Kendaraan Dinas Operasional (Double	2	Unit	Baik

	Kabin)			
25	Bus Angkutan Pelajar	5	Unit	Baik
26	Mobil Armroll (Persampahan)	3	Unit	Baik (2 unit) Rusak sedang (1 unit)
27	Mobil Pick Up (Persampahan)	2	Unit	Rusak sedang (1 unit) Rusak Berat (1 Unit)
28	Motor Tosa Roda Tiga (Persampahan)	6	Unit	Baik
29	Excavator (Persampahan)	1	Unit	Rusak Sedang
30	Mobil Dumptruck (Persampahan)	10	Unit	Baik (5 unit) Rusak Sedang (2 unit) Rusak Berat (3 unit)

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selama 5 Tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Realisasi RPJMD. Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabuapten Mempawah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 84 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2025 s/d 2026 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD maupun capaian kinerja sesuai target IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Awal Tahun	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian Kinerja tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Kinerja Tujuan / Sasaran		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan untuk meningkatkan lalu lintas yang tertib dan lancar	%	N/A	0	0	65	70	75	-	85,52	106,01	106,26	-	-	-	0,16	0,15	-
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Memningkatnya kualitas air dan udara (%)	%	N/A	70	75	80	85	90	N/A	N/A	83,34	73,53	-	-	-	0,10	0,09	-
							-	-	-										

Tabel TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Daerah	22.706.664.238					21.361.488.955					0,094				
Belanja Tidak Langsung	5.563.572.903					4.864.030.737					0,087				
Belanja Pegawai	5.563.572.903					4.864.030.737					0,087				
Belanja Langsung	17.143.091.335					16.497.458.218					0,096				
Belanja Barang dan Jasa	15.459.341.335					14.822.797.218					0,096				
Belanja Modal	1.683.750.000					1.674.661.000					0,099				
Belanja Daerah		22.164.743.142	22.631.086.460	22.546.369.616	27.172.564.604		19.919.014.840	21.368.977.977	21.583.167.959			0,090	0,094	0,096	-

Belanja Operasi		19.914.493.142	20.870.979.160	20.442.052.516	23.291.269.604		17.895.851.840	19.614.837.977	19.508.264.294			0,090	0,094	0,095	-
Belanja Pegawai		5.655.617.898	5.312.289.176	5.409.375.977	5.833.605.518		5.150.902.705	4.866.766.156	5.024.269.600			0,091	0,092	0,093	-
Belanja Barang dan Jasa		14.258.875.244	15.558.689.984	15.032.676.539	17.457.664.086		12.744.949.135	14.748.071.821	14.483.994.694			0,089	0,095	0,096	-
Belanja Modal		2.250.250.000	1.760.107.300	2.104.317.100	3.881.295.000		2.023.163.000	1.754.140.000	2.074.903.665	-		0,092	0,099	0,099	-

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten mempawah menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yakni sebagai berikut :

a. Tantangan :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati ketentuan berlalu lintas
2. Tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan yang tinggi dan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib uji tentang pentingnya melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor
4. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran
5. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
6. Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meningkatnya volume sampah kota akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perdagangan
8. Belum terlaksananya pengurangan sampah dari sumbernya

b. Peluang :

1. Telah adanya dukungan peraturan baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum.
2. Berkembangnya teknologi dan media informasi yang mempermudah dalam proses pelaksanaan pelayanan dan informasi kepada publik.
3. Tersedianya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang khususnya RTH.
4. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dalam bidang lingkungan hidup.

2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah masyarakat secara umum yang terdiri atas :

- Masyarakat pengguna jalan
- Masyarakat pengguna angkutan umum maupun perorangan
- Masyarakat Pengguna fasilitas parkir
- Masyarakat pelaku usaha dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Mempawah adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 1.276,90 Km² atau sekitar 0,87 persen dari luas Propinsi Kalimantan Barat, dilihat dari posisi geografis Kabupaten Mempawah berada di jalur lalu lintas yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah selatan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak.

Transportasi dan lingkungan hidup semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi dan lingkungan hidup berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan dan Lingkungan Hidup, karena prasarana transportasi dan Lingkungan Hidup yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi dan lingkungan Hidup secara umum di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan yakni dari total kebutuhan kelengkapan jalan sebanyak 13.772 unit hanya sekitar 10.244 unit yang dapat tersedia pada tahun 2023. Selain itu sebagian kelengkapan jalan yang tersedia berada dalam kondisi yang tidak baik atau mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran yang belum memadai dalam pengadaan dan rehabilitasi kelengkapan jalan serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.
2. Pada tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mempawah, persentase kendaraan angkutan barang dan

angkutan orang yang layak jalan adalah sebesar 26,28% yakni sebanyak 1412 unit yang melakukan uji kendaraan dari 5352 unit jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan uji kendaraan dalam upaya keselamatan berlalu lintas. Pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Mempawah, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yakni belum tersedianya 2 alat uji yakni speedometer tester dan slide slip tester. Beberapa alat uji juga dalam kondisi rusak yakni smoke tester dan Co/Hc. Dalam hal sumber daya manusia masih diperlukan beberapa pelatihan untuk meningkatkan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

3. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
4. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
5. Belum optimalnya proses pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah. Hal ini terindikasi dari terbatasnya dokumen uji kualitas lingkungan yang dilakukan karena minimnya sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia, belum adanya dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun secara berkala, tidak adanya petugas laboratorium yang menyebabkan keterbatasan fungsi laboratorium, hingga pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemberian informasi yang masih terbatas.
6. Belum optimalnya proses pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Mempawah. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memahami proses pengendalian B3 dan LB3. Selain itu dari segi jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 di Bidang Lingkungan Hidup juga masih sangat terbatas.
7. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan mengalami kendala internal berupa minimnya jumlah fungsional pengendali lingkungan hidup yang ada di Bidang Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan kecepatan verifikasi dokumen menjadi tidak seimbang dengan jumlah izin yang masuk. Selain itu,

- pelaku usaha/kegiatan juga terkadang tidak melengkapi dokumen persyaratan sehingga proses verifikasi berkas menjadi terlambat.
8. Kurang optimalnya kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta menumbuhkan budaya peduli terhadap Lingkungan Hidup dari masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat.
9. Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini perlu didorong oleh insentif maupun pendampingan secara intensif guna meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat.
10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan dalam pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Hidup. Masalah tersebut disebabkan belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran Dalam RPD
Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

Tujuan Sasaran RPD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Tujuan 2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yakni dari total kebutuhan kelengkapan jalan sebanyak 13.772 unit hanya sekitar 10.244 unit yang dapat tersedia	1. Anggaran yang belum memadai dalam penyediaan perlengkapan jalan.	1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam menilai jumlah kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan
Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik		2. Anggaran yang belum memadai dalam pemeliharaan/rehabil	

		pada tahun 2023. 2. Kelengkapan jalan yang tersedia berada dalam kondisi yang tidak baik atau mengalami kerusakan. 3. Persentase kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang layak jalan adalah sebesar 26,28% yakni sebanyak 1412 unit yang melakukan uji kendaraan dari 5352 unit jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yakni belum tersedianya alat uji speedometer tester dan slide slip tester 5. Beberapa alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi rusak yakni smoke tester dan Co/Hc. 6. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan SDM untuk meningkatkan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.	itasi perlengkapan jalan. 3. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia (SDM) penguji kendaraan bermotor yang mengikuti pelatihan kompetensi. 4. Anggaran yang belum memadai dalam penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor (alat uji kendaraan bermotor) 5. Anggaran yang belum memadai dalam perbaikan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor (alat uji kendaraan bermotor) 6. Belum memadainya sumber daya keuangan untuk melaksanakan pelatihan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor yang berkelanjutan	manusia 2. Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan 3. Telah tersedianya sumber daya manusia yang di Bidang Perhubungan 4. Pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor 5. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor (Kalibrasi) 6. Tersedianya Sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor
Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Berkelanjutan, Aman Dan Tertib	1. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan. 2. Belum optimalnya proses pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah. Hal ini terindikasi dari terbatasnya dokumen uji kualitas lingkungan yang dilakukan karena minimnya sumber daya anggaran maupun	1. Perencanaan lingkungan hidup : • Sudah disusun KLHS RDTR Kota Mempawah • Sudah disusun KLHS RDTR Kota Sungai Kunyit • Sudah disusun KLHS RDTR Kota Jongkat • Sudah disusun KLHS RTRW Kabupaten Mempawah 2. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup : • Sudah dilakukan pengujian kualitas lingkungan baik dari	1. Perencanaan lingkungan hidup : • Penyusunan dokumen perencanaan belum menjadi prioritas 2. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup : • Terbatasnya titik uji kualitas lingkungan • Minimnya anggaran • Minimnya Sumber Daya Manusia • Belum ada Dokumen IKLH • Tidak ada petugas Lab
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			

		sumber daya manusia, belum adanya dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun secara berkala, tidak adanya petugas laboratorium yang menyebabkan keterbatasan fungsi laboratorium, hingga pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemberian informasi yang masih terbatas. 3. Belum optimalnya proses pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Mempawah. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memahami proses pengendalian B3 dan LB3. Selain itu dari segi jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 di Bidang Lingkungan Hidup juga masih sangat terbatas. 4. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan mengalami kendala internal berupa minimnya jumlah fungsional pengendali lingkungan hidup yang ada di Bidang Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan kecepatan verifikasi dokumen menjadi tidak seimbang dengan jumlah izin yang masuk. Selain itu, pelaku usaha/kegiatan juga terkadang tidak melengkapi dokumen persyaratan sehingga proses verifikasi berkas menjadi terlambat. 5. Kurang optimalnya kegiatan peningkatan	APBD maupun bantuan APBN meskipun terbatas (sejumlah 8 titik). 3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LB3 : • Beberapa pelaku usaha sudah mulai memahami pentingnya pengelolaan B3 dan LB3 4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) : • Sudah pernah dilakukan sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Ada beberapa mitra pemerintah dan NGO yang sering bekerjasama dalam kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 6. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat : • Beberapa sekolah masih menunjukkan minat dan konsistensi dalam menerapkan pengelolaan lingkungan hidup	• Pemberian informasi masih terbatas 3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LB3 : • Minimnya Sumber Daya Manusia petugas yang menguasai pengelolaan B3 dan LB3 4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) : • Minimnya jumlah Fungsional Pengendali lingkungan hidup • Adanya keterlambatan Pelaku Usaha dalam melengkapi berkas persyaratan, sehingga tidak sesuai jadwal 5. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Keterbatasan anggaran • Keterbatasan SDM 6. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat : • Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam mengikuti penilaian 7. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup: • Belum adanya JFT
--	--	---	---	---

		pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta menumbuhkan budaya peduli terhadap Lingkungan Hidup dari masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat. 6. Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini perlu didorong oleh insentif maupun pendampingan secara intensif guna meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat. 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan dalam pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup. Masalah tersebut disebabkan belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan.	dan mengikuti tahapan penilaian 7. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup: • Sudah pernah dilakukan sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS
--	--	---	---	--

**3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJPD KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2005-2025**

Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing".

Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;

Misi 2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;

Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

Misi 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dikaitkan dengan visi dan misi dalam RPJPD 2005-2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terkait erat dengan pencapaian Misi ke 3 dan 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat penerima manfaat atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program dalam RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke 3 Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	• Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang belum mencukupi jumlah kebutuhan. • Kurangnya jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dari jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar	• Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang masih belum memadai • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor • Beberapa alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi rusak atau tidak optimal	▪ Telah disusunnya anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan ▪ Telah disusunnya anggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor ▪ Jumlah sumber daya manusia dalam Pengujian kendaran bermotor yang mencukupi
2	Misi ke 4 Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	▪ Belum optimalnya proses pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah ▪ Kecepatan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan tidak seimbang dengan jumlah izin yang masuk ▪ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan dalam pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	▪ Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. ▪ Kurangnya jumlah fungsional pengendali lingkungan hidup yang ada ▪ Kurangnya pengetahuan	▪ Sudah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas yang berkaitan dengan lingkungan hidup ▪ Adanya aturan perundangan bidang lingkungan hidup ▪ Adanya Komitmen pimpinan daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup • Terlaksananya

		Hidup Meningkatnya volume sampah akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dan pengelolaan persampahan yang belum optimal	masyarakat tentang tata cara pengaduan lingkungan hidup - Kurangnya pemahan dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya - Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dalam bidang lingkungan hidup Tersedianya sumber daya manusia yang mencukupi dalam pengelolaan persampahan
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra

a. Kementerian Perhubungan

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2025-2026) meliputi strategi sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 - Penguatan kelembagaan.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
 - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan Jaringan / rute;
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

- Implementasi standar pelayanan publik padasarana dan prasarana transportasi.
4. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
- Menyusun *Man Power Planning* SDM transportasi;
 - Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM transportasi;
5. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
 - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025- 2026 adalah :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada nilai 66 pada tahun 2025 dan 67 pada tahun 2026.
 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBp;

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 yang sudah ditetapkan akan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mempawah dengan

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasikan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *human error*;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
3. Rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah akan menempatkan Mempawah pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah;
4. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.
6. Menurunnya kualitas air;
7. Bertambahnya volume timbunan sampah;
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan konservasi Lingkungan Hidup
9. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi/sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung Visi Daerah **“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing** dan Misi Daerah ke 3 dan 4 yakni “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dan “Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)

Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

NO	TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	86,50	87
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah (Nilai)	86,50	87
		Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)	65	70
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	68	69
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	66	67

Tabel 4.2
Cascading Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2026

Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.41 Indeks	66 Indeks	67 Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapainya Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	100 %	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 Persentase	100 Persentase
												Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (KLHS)	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (KLHS)	100 Persentase	100 Persentase
												Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen

												RPJPD/RPJ MD	Kota	Kabupaten/Kota yang Disusun		
												Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapainya Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	85 %	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90 Persentase	95 Persentase
												Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Tersedianya Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang	1 Dokumen	1 Dokumen

												Iklm		Dilaksana-kan		
												Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Tersusun nya dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Doku- man	1 Doku- man
												Penanggula- ngan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Persentase Penanggulang an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	65 Persent ase	70 Persent ase
												Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedia-nya Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksana- kan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Ko ta yang Dilaksana-kan	1 Laporan	1 Lapora n
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Tercapainya Perlindungan dan Konservasi SDA	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	82 Persen	Pengelolaan Keanekarag aman Hayati Kabupaten/ Kota	Terlaksananya a Pengelola- an Keaneka- ragaman Hayati	Persentase Pengelola-an Keaneka- ragaman Hayati	81 Persen	82 Persen
												Pengelolaan Ruang	Tersedia nya RTH yang	Luas RTH yang Dikelola	4.82 Ha	4.89 Ha
												Terbuka Hijau (RTH)	Dikelola Lingkup Kewenangan	Lingkup Kewenang-an Kabupaten/Ko		

													Kabupa- ten/Kota	ta		
								PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tercapainya Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	75 Persen	Penyimpan- an sementara Limbah B3	Tersedianya Fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3	75 Persent ase	80 Persent ase
												Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpana n sementara Limbah B3 Dilaksana n Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Fasilitas Persetujuan/Iz in Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Iz in Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokume n	1 Dokum en
												Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpana n sementara Limbah B3	Tersedia nya Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuh-an Komitmen Persetuju- an/Izin Penyim- panan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Iz in Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Lapora n

												Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedia Nya Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	80 Persentase	85 Persentase
												Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselaksanya Fasilitas Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen

													Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	90 Persen	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	20 Perusahaan	20 Perusahaan
												Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Tersedianya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	9 Dokumen	10 Dokumen

												Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha
												Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Tersedianya PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	60 Persen	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kabupaten/	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	30 Persentase	35 Persentase

												Kota				
												Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksana-kan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksana-kan	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pe-laku Usaha/Kegiatan yang terlibat	125 Orang	150 Orang
												Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Tersedia-nya lembaga pendidikan-an formal /lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga

								PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tercapainya Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/ Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/ Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	90 Persen	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksana nya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	80 Persen ase	85 Persen ase
												Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	90 Persen	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Tercapainya Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	80 Persen ase	85 Persen ase
												Pengelolaan Pengaduan permasalahan	Tercapainya Jumlah pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran	5 Pengaduan	4 Pengaduan

												Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindak lanjuti/ditangani	an dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindak lanjuti/ditangani		
												Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tercapainya Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	28 Persen	Pengelolaan Sampah	Tercapainya Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten Mempawah	Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten Mempawah	27 Persen	28 Persen
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar	1 Dokumen	1 Dokumen

														Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		
												Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Tercapainya jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10363 Ton	11814 Ton
Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah	86,11 Nilai	86,50 Nilai	87,00 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepuasan Bidang Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	91 Persen	92 Persen
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1 Dokumen

												Dokumen RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokum en
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokum en
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokum en
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	2 Lapora n

																Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen		
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/b ulan	75 Orang/ bulan		
												Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Terlaksana Nya Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	24 Dokume n	24 Dokum en		
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Lapora n		
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	13 Laporan	13 Lapora n		

												Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD		
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksana Nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	70 Persen	80 Persen
												Penatausa- haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksana nya Penatausa- haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Lapora n
												Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	95 Persen	96 Persen
												Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket
												Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksana Nya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	15 Orang
												Administrasi Umum	Terlaksana Nya	Persentase pemenuhan	95 Persen	96 Persen

												Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kebutuhan administrasi umum		
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen

												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	76 Persen	77 Persen
												Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit
												Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa	93 Persen	95 Persen

												Pemerintah an Daerah	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah		
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Lapora n
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n
												Pemeliha- raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 Persen	95 Persen
												Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit

												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	1 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	13 Unit	23 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	12 Unit	12 Unit
			Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung	45 Persentase	65 Persentase	70 Persentase	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tercapainya Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	55 %	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 Persentase	100 Persentase

				Perlengka -pan Jalan					Lalu Lintas			Kota	Kabupaten/Ko ta			
												Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksana Nya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta	1 Dokume n	1 Dokum en
												Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamata n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana Nya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Ko ta	1 Dokume n	1 Dokum en
												Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamata n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana Nya Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Ko ta	1 Dokume n	1 Dokum en
												Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	72	74
												Pembangun an Prasarana	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan	4 Unit	5 Unit

												Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Ko ta yang Terbangun		
												Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	160 Unit	210 Unit
												Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Perlengkap an Jalan	Terpelihara nya Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	170 Unit	172 Unit
												Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana- nya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	70 Persen	75 Persen
												Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terpelihara- nya Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	3 Unit
												Penerbitan Izin Penyelengg araan dan Pembangun an Fasilitas Parkir	Terlaksana- nya Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	72 Persen	73 Persen
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Terlaksana- nya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Laporan	12 Lapora n

												Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
												Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40 Persentase	55 Persentase
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit
												Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang
												Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1000 Unit	1000 Unit
												Penyediaan Bukti Lulus	Tersedianya Bukti Lulus Uji	Jumlah Dokumen	1600 Dokume	1600 Dokum

												Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n	en
												Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksana- nya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosiali- sasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Lapora n
												Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksana- nya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	1 Lapora n
												Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpelihara- nya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8 Unit	8 Unit
												Koordinasi Penyelengg araan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksana- nya Koordinasi Penyelenggara an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Lapora n
												Monitoring dan Evaluasi Penyelengg araan Pengujian	Terlaksana- nya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	1 Laporan	1 Lapora n

												Berkala Kendaraan Bermotor	an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
												Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana- nya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	34 Persen	36 Persen
												Pengawasan dan Pengendalia n Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana- nya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Ko ta	2 Laporan	2 Lapora n
												Pembangun an Implementa si Batas Kecepatan	Terlaksana- nya Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	4 Unit	4 Unit
												Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana- nya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta	2 Dokume n	2 Dokum en
												Forum Lalu Lintas dan	Terlaksana- nya Forum	Jumlah laporan Forum	4 Laporan	4 Lapora

												Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta		n
												Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksana- nya Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokume n	1 Dokum en
												Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksana- nya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Pr ovinsi	4 Laporan	4 Lapora n
												Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Ko ta	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengolahan Parkir Pada Kabupaten/Ko ta	78 Persent ase	80 Persent ase
												Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensiny	2 Orang	2 Orang

														a dan tersertifikasi		
												Pengawasan Pelaksanaan Rekomenda si Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksana- nya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	1 Lapora n
												Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Terlaksana- nya Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 Dokume n	1 Dokum en
												Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum yang Melayani Trayek di Dalam Kabupaten/Ko ta	71 Persen	72 Persen
												Pengendalia n dan Pengawasan Ketersediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Terlaksana- nya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	12 Laporan	12 Lapora n

												Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Ko ta		
												Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya- Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	4 Unit	4 Unit

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

Strategi merupakan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison, waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dirumuskan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan
2. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

5.2. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dan ditetapkan oleh Pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan merupakan komitmen yang disepakati bersama untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan sebagai konsep operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap dikomitmenkan bersama sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dalam rangka mengarahkan/mengorganisasikan program-

program dan kegiatan sebagai tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pelaksanaan pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perlengkapan jalan yang mendorong keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan.
2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melalui optimalisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : • Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing			
Misi : • Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik • Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
• Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	• Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat • Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik • Melakukan pembangunan , penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan	• Peningkatan Kinerja Kesekretariatan • Peningkatan kinerja pelaksanaan pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perlengkapan jalan yang mendorong keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan
• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melalui optimalisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu dua tahun mulai Tahun Pertama (2025) sampai dengan Tahun Kedua (2026), maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja program, kegiatan sub kegiatan, dan target kinerja program serta kerangka pendanaan.

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan kegiatan <i>(output)</i>	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Bidang Penanggung Jawab
					2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	86,11	86,50		87,00		87,00		Sekretariat
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah (Nilai)	86,11	86,50		87,00		87,00		Sekretariat

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	70,00	80,00	18.130.248.816	85,00	18.694.148.816	85,00	18.694.148.816	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	90,00	91,00	46.000.000	92,00	49.000.000	92,00	49.000.000	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100,00	100,00	6.366.248.816	100,00	6.367.648.816	100,00	6.367.648.816	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	65,00	70,00	12.500.000	80,00	13.000.000	80,00	13.000.000	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	95,00	95,00	125.000.000	96,00	127.000.000	96,00	127.000.000	Sekretariat

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	95,00	95,00	209.500.000	96,00	224.000.000	96,00	224.000.000	Sekretariat
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	75,00	76,00	3.330.000.000	77,00	3.355.000.000	77,00	3.355.000.000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90,00	93,00	7.560.000.000	95,00	8.062.000.000	95,00	8.062.000.000	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00	93,00	481.000.000	95,00	496.500.000	95,00	496.500.000	Sekretariat
	Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan		Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan	45,00	65,00		70,00		70,00		Bid.Perhubungan dan UPT PKB

			(Persentase)								
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	45,00	50,00	6.365.000.000	55,00	7.545.000.000	55,00	7.545.000.000	Bid.Perhubungan dan UPT PKB
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ	0,00	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	Bid.Perhubungan
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70,00	72,00	3.500.000.000	74,00	4.600.000.000	74,00	4.600.000.000	Bid.Perhubungan
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	65,00	70,00	600.000.000	75,00	650.000.000	75,00	650.000.000	Bid.Perhubungan

		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kegiatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	70,00	72,00	40.000.000	73,00	40.000.000	73,00	40.000.000	Bid.Perhubungan
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30,00	40,00	865.000.000	55,00	875.000.000	55,00	875.000.000	UPT PKB
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	30,00	34,00	270.000.000	36,00	270.000.000	36,00	270.000.000	Bid.Perhubungan

		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengolahan Parkir Pada Kabupaten/Kota	75,00	78,00	90.000.000	80,00	90.000.000	80,00	90.000.000	Bid.Perhubungan
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum yang Melayani Trayek di Dalam Kabupaten/Kota	70,00	71,00	550.000.000	72,00	570.000.000	72,00	570.000.000	Bid.Perhubungan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	66,28	68,00		69,00		69,00	-	Bid. Lingkungan Hidup
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	65,41	66,00		67,00		67,00	-	Bid. Lingkungan Hidup

		PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGA N HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	100,00	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0,00	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (KLHS)	100,00	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	70,00	80,00	375.000.000	85,00	375.000.000	85,00	375.000.000	Bid. Lingkungan Hidup

		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	80,00	90,00	300.000.000	95,00	300.000.000	95,00	300.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Penanggulang an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	55,00	65,00	75.000.000	70,00	75.000.000	70,00	75.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	80,00	81,00	918.750.000	82,00	964.687.500	82,00	964.687.500	Bid. Lingkungan Hidup

		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80,00	81,00	918.750.000	82,00	964.687.500	82,00	964.687.500	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN (B3)DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dariBahan Berbahaya dan Beracun	60,00	70,00	105.000.000	75,00	105.000.000	75,00	105.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3	65,00	75,00	60.000.000	80,00	60.000.000	80,00	60.000.000	Bid. Lingkungan Hidup

		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	70,00	80,00	45.000.000	85,00	45.000.000	85,00	45.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	75,00	85,00	120.000.000	90,00	120.000.000	90,00	120.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	15,00	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	Bid. Lingkungan Hidup

		Kabupaten/ Kota									
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0,00	60,00	559.250.000	60,00	584.712.500	60,00	584.712.500	Bid. Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan
		Kegiatan Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/	Persentase Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	0,00	30,00	559.250.000	35,00	584.712.500	35,00	584.712.500	Bid. Lingkungan Hidup

		Kota									
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	75,00	85,00	50.000.000	90,00	50.000.000	90,00	50.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	70,00	80,00	50.000.000	85,00	50.000.000	85,00	50.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	75,00	85,00	50.000.000	90,00	50.000.000	90,00	50.000.000	Bid. Lingkungan Hidup

		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	70,00	80,00	50.000.000	85,00	50.000.000	85,00	50.000.000	Bid. Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	26,81	27,00	7.009.219.921	28,00	7.359.680.917	28,00	7.359.680.917	Bid. Kebersihan dan Pertamanan
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten Mempawah	26,81	27,00	7.009.219.921	28,00	7.359.680.917	28,00	7.359.680.917	Bid. Kebersihan dan Pertamanan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dalam dua tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Mempawah 2025- 2026 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah (Nilai)	86,11	86,50	87,00	87,00
2.	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)	45	65	70	70
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	65.41	66	67	67

Dalam menghitung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tabel diatas maka dirumuskan formula sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah (Nilai)
- IKM

=

Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten mempawah
2. Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
- Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan Yang Tersedia

x 100

Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan Yang Dibutuhkan
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)
- IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Indeks kualitas air (IKA)	51,88	67,6	67,8	67,8
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,34	81,32	81,52	81,52
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46,23	70,79	70,86	70,86
4.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	1	1	1
5.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	9 Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan (data	20	20	20

	oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	pendukung)			
6.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	0	0	0
7.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	0	0	0
8.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	0	0	0
9.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	3 pengaduan	5	4	9
10.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	55,07 %	60%	62%	62%

11.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	26,38%	40%	55%	55%
12.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1	1	1	1
13.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	70	75	75

Dalam menghitung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tabel diatas maka dirumuskan formula sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	RUMUS/CARA MENGHITUNG
1.	Indeks kualitas air (IKA)	$IP_i = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Dimana L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : (C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j},...) (C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemar ringan c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang d. $IP_j \geq 10,0$: cemar berat

		<table> <tr> <th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr> </table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq x < 90$	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																		
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$																		
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$																		
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$																		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																		
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	= Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{\text{eu}} - 0.1)]$ <table> <tr> <th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr> </table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq x < 90$	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																		
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$																		
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$																		
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$																		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																		
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$																		
4.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Jumlah informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota																		
5.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota																		
6.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Pejabat pengawas Lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di provinsi}}{\text{Usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota}} \times 100$																		
7.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota																		
8.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat																		
9.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani																		

	yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	
10.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia Fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang dibuthkan x 100
11.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji x 100
12.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi
13.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome*
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	65.41	66	67	67
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	26,81	27	28	28

3.	Ketaatan Penanggungn jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	1	1	1
4.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	80	81	82	82
5.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,02	0,19	0,10	0,10

Dalam menghitung Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tabel diatas maka dirumuskan formula sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	RUMUS/CARA MENGHITUNG
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	$= (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total Volume Sampah Yang Dapat Ditangani}}{\text{Total Vol Timbunan Sampah Kab/Kota}} \times 100\%$
3.	Ketaatan Penanggungn jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/kota}}{\text{Usaha dan / atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
4.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ o IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= $\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}$ dibagi $(\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut})$ Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP

		- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
		- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
5.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah 2 (dua) tahunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Mempawah 2 tahun 2025 – 2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Mempawah. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Mempawah yang lebih cerdas, mandiri dan terdepan.

Mempawah, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah

Drs. ASWIN. AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196802031989031007

Formulir E.73
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah
Periode Renstra 2025 – 2026

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA- Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi	√	√	-	-	-
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran	√	√	-	-	-
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan	√	√	-	-	-
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah	√	√	-	-	-
Indikasi rencana program yang prioritas disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif	√	√	-	-	-

Mempawah, Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Mempawah



Drs. ASWIN. AS, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 196802031989031007

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke										Rasio Capaian pada Tahun ke										Unit Penanggungjawab			
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat		Meningkatnya Kualitas Air dan Udara (Persen)	45	60	47	50	53	57	60	0	35.38	66.67	62.5	0	0	70.76	125.78	109.65																	Bidang Lingkungan Hidup			
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	N/A	100	200,000,000	0	0	100	200,000,000	0	100	200,000,000	0	0	50	99,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup		
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	N/A	100	200,000,000	0	0	100	200,000,000	0	100	200,000,000	0	0	50	99,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata RuangKabupaten/Kota yang Disusun	N/A	0	0	0	0	1	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	N/A	1	200,000,000	0	0	1	100,000,000	0	1	200,000,000	0	0	0	99,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	75	620,000,000	0	65	671,947,500	76	1,040,000,000	76	580,000,000	75	620,000,000	0	0	44.78	458,073,500	44.44	102,561,350	44.44	83,983,717	0	0	0	0	68.89	68.17	63.49	9.86	63.49	14.48					Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	N/A	90	170,000,000	70	75	640,000,000	80	660,000,000	85	165,000,000	90	170,000,000	0	0	100.00	427,043,700	100.00	45,593,550	100.00	32,771,867	0	0	0	0	133.33	66.73	125.00	6.91	117.85	19.86					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	N/A	1	130,000,000	0	2	620,000,000	2	620,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	0	0	2	408,925,000	2	22,798,950	1	15,680,250	0	0	0	0	100.00	65.96	100.00	3.68	100.00	12.54					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Migas Dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	N/A	1	40,000,000	0	1	20,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	0	0	1	18,118,700	1	22,794,600	1	17,091,617	0	0	0	0	100.00	90.59	100.00	56.99	100.00	42.73					Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	N/A	65	205,000,000	0	50	20,047,500	55	175,000,000	60	190,000,000	65	205,000,000	0	0	33.33	19,130,400	33.33	56,907,800	33.33	51,211,850	0	0	0	0	66.67	95.43	60.61	32.52	55.56	26.95					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	N/A	1	85,000,000	0	1	20,047,500	1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	0	0	1	19,130,400	1	56,907,800	1	51,211,850	0	0	0	0	100.00	95.43	100.00	75.88	100.00	64.01					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Pengolahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disolasi	N/A	1	50,000,000	0	0	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	N/A	1	70,000,000	0	0	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	N/A	65	245,000,000	0	50	11,900,000	55	205,000,000	60	225,000,000	65	245,000,000	0	0	20	11,899,400	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	N/A	1	45,000,000	0	1	11,900,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	0	0	1	11,899,400	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00					Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	N/A	1	65,000,000	0	0	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	N/A	1	45,000,000	0	0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	N/A	1	45,000,000	0	0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	N/A	1	45,000,000	0	0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	N/A	80	875,000,000	60	65	259,410,000	70	525,000,000	75	1,000,000,000	80	875,000,000	0	0	50	198,932,000	50	308,791,000	50	301,108,135	0	0	0	0	76.92	76.69	71.43	58.82	66.67	30.11					Bidang Kebersihan dan Pertamanan	
		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	N/A	85	875,000,000	60	65	259,410,000	70	525,000,000	75	1,000,000,000	80	875,000,000	0	0	50	198,932,000	50	308,791,000	50	301,108,135	0	0	0	0	76.92	76.69	71.43	58.82	66.67	30.11					Bidang Kebersihan dan Pertamanan	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	N/A	0	0	0	0	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bidang Kebersihan dan Pertamanan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	4.7	875,000,000	0	4.7	259,410,000	4.7	325,000,000	4.7	1,000,000,000	4.7	875,000,000	0	0	4.7	198,932,000	4.7	308,791,000	4.7	301,108,135	0	0	0	0	100.00	76.69	100.00	95.01	100.00	30.11					Bidang Kebersihan dan Pertamanan	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dan Bahan Berbahaya dan Beracun	N/A	65	110,000,000	0	55	18,187,000	60	110,000,000	65	110,000,000	65	110,000,000	0	0	100	18,174,700	50	40,574,900	50	25,849,150	0	0	0	0	181.82	99.93	83.33	36.89	76.92	23.50					Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	80	60,000,000	0	60	9,067,000	65	60,000,000	70	60,000,000	75	60,000,000	0	0	100	9,050,300	50	25,075,000	50	15,910,100	0	0	0	0	166.67	99.93	76.92	41.79	71.43	26.52					Bidang Lingkungan Hidup	

Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	1	30,000,000	0	-	1	4,353,800	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0	1	4,351,600	1	23,375,000	7	15,910,100	0	0	0	0	100,00	99,95	100,00	77,92	700,00	53,03			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan PengumpulanLimbah B3	N/A	1	30,000,000	0	-	1	4,703,200	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0	1	4,698,700	0	1,700,000	0	-	0	0	0	0	100,00	99,90	0,00	5,67	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup	
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3	N/A	80	50,000,000	0	-	65	9,130,000	70	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000	0	0	100	9,124,400	50	15,499,900	50	9,939,050	0	0	0	0	153,85	99,94	71,43	31,00	66,67	19,88			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	1	25,000,000	0	-	1	4,423,800	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0	1	4,418,600	0	2,060,000	0	-	0	0	0	0	100,00	99,88	0,00	8,24	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Merajid Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	N/A	1	25,000,000	0	-	1	4,706,200	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0	1	4,705,800	1	13,439,900	1	9,939,050	0	0	0	0	100,00	99,99	100,00	53,76	100,00	39,76			Bidang Lingkungan Hidup	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Terpenuhnya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	N/A	80	168,000,000	0	-	50	37,615,000	70	168,000,000	75	168,000,000	80	168,000,000	0	0	23,33	28,610,200	103,89	123,084,250	76,25	86,613,550	0	0	0	0	46,67	76,06	148,41	73,26	101,67	51,56			Bidang Lingkungan Hidup	
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPH Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPH diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	N/A	85	168,000,000	0	-	65	37,615,000	70	168,000,000	75	168,000,000	80	168,000,000	0	0	23,33	28,610,200	103,89	123,084,250	76,25	86,613,550	0	0	0	0	35,90	76,06	148,41	73,26	101,67	51,56			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	N/A	15	42,000,000	0	-	15	23,836,800	15	42,000,000	15	42,000,000	15	42,000,000	0	0	11	14,835,300	13	31,934,750	18	27,572,200	0	0	0	0	73,33	62,24	86,87	76,04	120,00	65,65			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	N/A	5	42,000,000	0	-	0	-	5	42,000,000	5	42,000,000	5	42,000,000	0	0	0	0	7	30,450,000	3	10,210,000	0	0	0	0	0	0	140,00	72,50	60,00	24,31			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	22	42,000,000	0	-	15	13,778,200	18	42,000,000	20	42,000,000	22	42,000,000	0	0	3	13,774,900	16	35,699,750	9	27,429,600	0	0	0	0	20,00	99,98	88,89	85,00	45,00	65,31			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	N/A	1	42,000,000	0	-	0	-	1	42,000,000	1	42,000,000	1	42,000,000	0	0	0	0	1	24,999,750	1	21,401,750	0	0	0	0	0	0	100,00	59,52	100,00	50,96			Bidang Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkat	N/A	80	74,000,000	55	-	60	37,098,700	70	74,000,000	75	74,000,000	80	74,000,000	0	0	0	2,084,700	0	-	0	-	0	0	0	0	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	N/A	85	74,000,000	0	-	65	37,098,700	70	74,000,000	75	74,000,000	80	74,000,000	0	0	0	2,084,700	0	-	0	-	0	0	0	0	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompokMasyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	N/A	1	50,000,000	0	-	1	37,098,700	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0	2,084,700	0	-	0	-	0	0	0	0	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Bertudaya Lingkungan Hidup yang Diaksanakan	N/A	1	24,000,000	0	-	0	-	1	24,000,000	1	24,000,000	1	24,000,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			Bidang Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	80	51,750,000	0	-	60	32,200,000	72	47,250,000	75	49,500,000	80	51,750,000	0	0	100	16,197,400	150	36,079,950	100	28,074,150	0	0	0	0	166,67	50,30	208,33	76,36	133,33	56,72			Bidang Lingkungan Hidup	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	N/A	80	51,750,000	0	-	65	32,200,000	70	47,250,000	75	49,500,000	80	51,750,000	0	0	100	16,197,400	150	36,079,950	100	28,074,150	0	0	0	0	153,85	50,30	214,29	76,36	133,33	56,72			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duna Usaha/Duna Pendidikan/Flantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duna Usaha/Duna Pendidikan/Flantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	N/A	2	51,750,000	0	-	1	32,200,000	2	47,250,000	2	49,500,000	2	51,750,000	0	0	1	16,197,400	3	36,079,950	2	28,074,150	0	0	0	0	100,00	50,30	150,00	76,36	100,00	56,72			Bidang Lingkungan Hidup	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan Masyarakat yang di Tangani	N/A	80	46,000,000	0	-	65	13,087,500	70	42,000,000	75	44,000,000	80	46,000,000	0	0	30	13,084,200	83,33	33,814,516	75	26,343,070	0	0	0	0	46,15	99,97	119,05	80,51	100,00	59,87			Bidang Lingkungan Hidup	
Kegiatan Penyelidikan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang PPLH	N/A	85	46,000,000	0	-	65	13,087,500	70	42,000,000	75	44,000,000	80	46,000,000	0	0	30	13,084,200	83,33	33,814,516	75	26,343,070	0	0	0	0	46,15	99,97	119,05	80,51	100,00	59,87			Bidang Lingkungan Hidup	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	N/A	0	26,000,000	0	-	5	13,087,500	6	22,000,000	6	24,000,000		26,000,000	0	0	3	13,084,200	4	16,279,600	3	9,748,600	0	0	0	0	60,00	99,97	66,67	74,00	50,00	40,62			Bidang Lingkungan Hidup	

		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Singketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Singketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	N/A	0	20,000,000	0	-	0	-	1	20,000,000	1	20,000,000		20,000,000	0	0	0	0	1	17,534,916	1	16,594,470	0	0	0	0	0	0	100.00	87.67	100.00	82.97				Bidang Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	N/A	75	6,895,449,544	60	-	65	5,586,749,544	72	6,295,449,544	75	6,595,449,544	75	6,895,449,544	0	0	50	5,981,470,844	50.29	6,152,173,834	50	5,809,533,269	0	0	0	0	76.93	107.07	69.84	97.72	66.67	88.08				Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Perentase pengelolaan persampahan di Wilayah Kabupaten Mempawah	N/A	85	6,675,449,544	0	-	65	5,586,749,544	70	6,075,449,544	75	6,375,449,544	80	6,675,449,544	0	0	100	5,981,470,844	100.58	6,152,173,834	100	5,809,533,269	0	0	0	0	153.85	107.07	143.68	101.26	133.33	91.12				Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/TPst/Spa Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Ditolah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	N/A	9091	5,325,449,544	0	-	8855	4,541,148,544	8934	4,825,449,544	9012	5,075,449,544	9091	5,325,449,544	0	0	8856	4,888,116,044	9037	4,714,814,934	9091	4,491,966,524	0	0	0	0	100.01	107.64	101.15	97.71	100.88	88.50				Bidang Lingkungan Hidup	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	N/A	1	1,350,000,000	0	-	1	1,045,601,000	1	1,250,000,000	1	1,300,000,000	1	1,350,000,000	0	0	1	1,093,354,800	1	1,437,358,900	1	1,317,566,745	0	0	0	0	100.00	104.57	100.00	114.99	100.00	101.35				Bidang Lingkungan Hidup	
		Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan/pengelolaan Sampah Yang Dielektenggerakan Oleh Pihak Swasta	Perentase pengawasan kinerja tenaga kebersihan	N/A	80	220,000,000	0	-	0	-	65	220,000,000	70	220,000,000	75	220,000,000	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	N/A	1	220,000,000	0	-	0	-	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				Bidang Lingkungan Hidup
2	Perentase meningkatnya layanan perkantoran (Persen)		Perentase meningkatnya layanan perkantoran (Persen)	N/A	90	-	70		75		80		85		90		0		75.74		73.90		74.88		0	0	0	0	100.99		92.37		88.09				Sekretariat Dinas		
		Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	N/A	70	16,325,247,920	50	-	50	12,084,493,120	60	12,780,238,889	65	15,736,747,920	70	16,325,247,920	0	0	75.74	10,256,503,296	73.90	11,057,298,179	74.88	11,260,778,947	0	0	0	0	151.49	84.87	123.16	86.52	115.20	71.56				Sekretariat Dinas	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase tingkat ketepatan Waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	95	42,000,000	0	-	75	30,000,000	80	41,000,000	85	42,000,000	90	42,000,000	0	0	91.67	26,822,000	91.67	29,999,900	91.67	28,937,375	0	0	0	0	122.22	89.41	114.58	73.17	107.84	68.90				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	2	7,000,000	0	-	2	5,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	0	0	1	3,938,750	1	5,000,000	1	4,900,800	0	0	0	0	50.00	78.78	50.00	83.33	50.00	70.01				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1	5,000,000	0	-	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	0	1	2,496,250	1	2,500,000	1	2,404,960	0	0	0	0	100.00	99.85	100.00	50.00	100.00	48.10				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1	4,000,000	0	-	1	2,500,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	0	0	1	2,496,250	1	2,500,000	1	2,494,305	0	0	0	0	100.00	99.85	100.00	62.50	100.00	62.36				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1	5,000,000	0	-	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	0	1	2,496,250	1	2,500,000	1	2,370,180	0	0	0	0	100.00	99.85	100.00	50.00	100.00	47.40				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1	4,000,000	0	-	1	2,500,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	0	0	1	2,496,250	1	2,500,000	1	2,493,430	0	0	0	0	100.00	99.85	100.00	62.50	100.00	62.34				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	2	17,000,000	0	-	2	15,000,000	2	17,000,000	2	17,000,000	2	17,000,000	0	0	2	12,888,250	2	14,999,900	2	14,273,700	0	0	0	0	100.00	85.99	100.00	88.23	100.00	83.96				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	100	6,063,707,920	0	-	100	5,885,617,920	100	6,001,038,889	100	6,062,207,920	100	6,063,707,920	0	0	86.25	5,176,026,305	84.04	4,897,115,956	82.5	5,049,238,585	0	0	0	0	86.25	87.94	84.04	81.60	82.50	83.29				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	70	6,010,617,920	0	-	60	5,855,617,920	65	5,968,538,889	70	6,010,617,920	70	6,010,617,920	0	0	57	5,150,902,705	56	4,866,766,156	56	4,991,659,600	0	0	0	0	95.00	87.97	86.15	81.54	80.00	83.05				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	4	30,090,000	0	-	4	10,000,000	4	11,000,000	4	29,590,000	4	30,090,000	0	0	2	7,859,600	2	10,999,900	2	38,074,340	0	0	0	0	50.00	78.60	50.00	100.00	50.00	128.67				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1	16,500,000	0	-	1	15,500,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	16,500,000	0	0	1	13,026,400	1	14,999,900	1	14,509,200	0	0	0	0	100.00	86.84	100.00	96.77	100.00	90.68				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	1	6,500,000	0	-	1	5,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,500,000	0	0	1	4,237,600	1	4,350,000	1	4,995,445	0	0	0	0	100.00	84.75	100.00	72.50	100.00	83.26				Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Sub Kegiatan Administrasi Barang Mik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Amnistrasi Barang Mik Daerah	N/A	65	12,340,000	0	-	0	-	0	-	60	12,340,000	65	12,340,000	0	0	0	0	0	-	100	16,490,080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	166.67	133.63				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Mik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mik Daerah pada SKPD	N/A	12	12,340,000	0	-	0	-	0	-	12	12,340,000	12	12,340,000	0	0	0	-	0	-	12	16,490,080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100.00	133.63				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur	N/A	90	84,700,000	0	-	75	66,880,200	80	74,700,000	85	79,700,000	90	84,700,000	0	0	140	56,478,700	116.67	82,971,972	43.75	29,342,413	0	0	0	0	186.67	84.45	145.83	111.07	51.47	36.82				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	N/A	2	34,700,000	0	-	2	31,880,200	2	34,700,000	2	34,700,000	2	34,700,000	0	0	2	31,880,200	2	32,799,800	0	-	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	94.52	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Penundang-Undangan	N/A	10	50,000,000	0	-	5	35,000,000	6	40,000,000	8	45,000,000	10	50,000,000	0	0	9	24,598,500	8	50,172,172	7	29,342,413	0	0	0	0	180.00	70.28	133.33	125.43	87.50	65.21				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	95	199,000,000		-	75	147,570,000	80	185,000,000	85	192,000,000	90	199,000,000	0	0	123.81	91,263,350	118.21	148,046,313	65.71	166,783,160	0	0	0	0	165.08	61.84	147.76	80.03	100.84	86.87				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	10,000,000	0	-	1	8,920,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	0	0	1	8,918,700	1	10,000,000	1	9,982,465	0	0	0	0	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	99.82				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	2	20,000,000	0	-	2	12,495,000	2	16,000,000	2	18,000,000	2	20,000,000	0	0	2	12,492,800	1	16,560,000	2	25,579,395	0	0	0	0	100.00	99.98	50.00	103.50	100.00	142.11				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1	15,000,000	0	-	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	0	0	1	10,000,000	1	15,000,000	1	14,996,500	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.98				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetaklan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetaklan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1	32,000,000	0	-	1	31,155,000	1	32,000,000	1	32,000,000	1	32,000,000	0	0	1	31,153,350	1	31,999,750	1	34,591,185	0	0	0	0	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	108.10				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disedakan	N/A	1	45,000,000	0	-	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	30	70,000,000	0	-	15	50,000,000	20	70,000,000	25	70,000,000	30	70,000,000	0	0	25	24,430,000	35	67,486,713	67	74,867,585	0	0	0	0	166.67	48.86	175.00	96.41	268.00	106.95				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penatausahaan Ansp Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	N/A	41	7,000,000	0	-	41	5,000,000	41	7,000,000	41	7,000,000	41	7,000,000	0	0	123	4,268,500	124	6,999,850	119	6,766,030	0	0	0	0	300.00	85.37	302.44	100.00	290.24	96.66				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Kegiatan Pengadaan Barang Mik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Mik daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	N/A	75	2,445,000,000	0	-	0	-	0	-	70	2,370,000,000	75	2,445,000,000	0	0	0	0	25	540,700,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	N/A	7	2,220,000,000	0	-	0	-	0	-	7	2,220,000,000	7	2,220,000,000	0	0	0	0	1	505,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2	125,000,000	0	-	0	-	0	-	2	100,000,000	2	125,000,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	3	50,000,000	0	-	0	-	0	-	3	25,000,000	3	50,000,000	0	0	0	0	0	15,900,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	3	50,000,000	0	-	0	-	0	-	3	25,000,000	3	50,000,000	0	0	0	0	0	19,800,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	N/A	95	7,327,000,000	0	-	75	5,821,705,000	80	6,327,000,000	85	6,827,000,000	90	7,327,000,000	0	0	100	4,828,908,783	100	5,249,563,188	100	5,872,031,044	0	0	0	0	133.33	82.95	125.00	82.97	117.65	86.01				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	3	7,268,000,000	0	-	3	5,768,000,000	3	6,268,000,000	3	6,768,000,000	3	7,268,000,000	0	0	3	4,775,203,783	3	5,189,981,964	3	5,765,394,162	0	0	0	0	100.00	82.79	100.00	82.80	100.00	85.48				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	59,000,000	0	-	12	53,705,000	12	59,000,000	12	59,000,000	12	59,000,000	0	0	12	53,705,000	12	59,581,224	12	66,636,882	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.99	100.00	146.84				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Mik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Mik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	N/A	90	151,500,000	0	-	75	132,720,000	80	151,500,000	85	151,500,000	90	151,500,000	0	0	64.22	77,004,158	55.61	108,900,850	95.38	97,956,290	0	0	0	0	85.63	58.02	69.51	71.88	112.22	64.66				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	1	23,000,000	0	-	1	21,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	0	0	1	20,230,183	1	37,210,650	1	22,720,845	0	0	0	0	100.00	96.33	100.00	161.79	100.00	98.79				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	45	73,000,000	0	-	45	71,020,000	45	73,000,000	45	73,000,000	45	73,000,000	0	0	32	46,174,200	23	56,860,200	49	55,553,560	0	0	0	0	71.11	65.02	51.11	77.89	108.89	76.10				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	40,000,000	0	-	1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	0	0	0	-	0	-	1	4,852,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12.13				Sub Bagian Umum dan Aparatur		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	13	7,500,000	0	-	13	4,000,000	13	7,500,000	13	7,500,000	13	7,500,000	0	0	13	3,900,000	10	6,900,000	10	6,899,950	0	0	0	0	100.00	97.50	76.92	92.00	76.92	92.00				Sub Bagian Umum dan Aparatur		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	12	8,000,000	0	-	12	6,700,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	0	0	6	6,699,775	6	7,930,000	13	7,929,935	0	0	0	0	0	50.00	100.00	50.00	99.13	108.33	99.12			Sub Bagian Umum dan Aparatur
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan			Persentase Ruas Jalan yang Diengkapi Kelengkapan (Persen)	75	100	-	80		85		90		95		100		0		62.34		84.81		74.38		0	0	0	0	0	73.34		94.23		78.29			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	N/A	82	5,250,000,000	82	-	82	3,476,095,000	82	4,150,000,000	82	7,215,000,000	82	5,250,000,000	0	0	71.64	2,945,884,000	75.33	3,514,659,998	98.09	3,861,316,971	0	0	0	0	0	87.37	84.75	91.87	84.69	119.62	53.52			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	N/A	80	2,950,000,000	0	-	0	2,568,248,900	65	2,800,000,000	70	3,900,000,000	75	2,950,000,000	0	0	68.33	2,094,639,750	74.31	2,494,537,650	94.87	2,508,614,895	0	0	0	0	0	0.00	81.56	114.33	89.09	135.52	64.32			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	N/A	3	450,000,000	0	-	2	316,500,000	3	400,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	0	0	2	315,950,000	3	729,292,000	3	419,757,985	0	0	0	0	0	100.00	99.83	100.00	182.32	100.00	93.28			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	14	4,725,000,000	0	-	13	1,566,748,900	13	1,650,000,000	14	2,650,000,000	14	4,725,000,000	0	0	13	1,375,647,900	10	1,000,224,000	11	1,153,822,805	0	0	0	0	0	100.00	87.80	76.92	60.62	78.57	43.54			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A	168	800,000,000	0	-	160	685,000,000	163	750,000,000	166	800,000,000	168	800,000,000	0	0	8	403,041,850	75	765,021,650	176	935,034,105	0	0	0	0	0	5.00	58.84	46.01	102.00	106.02	116.88			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	N/A	65	220,000,000	0	-	0	-	50	220,000,000	55	220,000,000	60	220,000,000	0	0	100	0	100	7,111,100	150	6,544,015	0	0	0	0	0	0.00	0.00	200.00	3.23	272.73	2.97			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Yang Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	2	220,000,000	0	-	0	-	2	220,000,000	2	220,000,000	2	220,000,000	0	0	2	0	2	7,111,100	3	6,544,015	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100.00	3.23	150.00	2.97			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase peningkatan sarana prasarana perhubungan	N/A	75	40,000,000	0	-	0	9,103,300	60	40,000,000	65	40,000,000	70	40,000,000	0	0	100	7,693,200	100	38,424,900	100	39,368,110	0	0	0	0	0	0.00	84.51	166.67	96.06	153.85	98.42			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	1	40,000,000	0	-	1	9,103,300	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	0	0	1	7,693,200	1	38,424,900	1	39,368,110	0	0	0	0	0	100.00	84.51	100.00	96.06	100.00	98.42			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	85	600,000,000	0	-	65	404,312,700	70	500,000,000	75	1,640,000,000	80	600,000,000	0	0	43.17	493,609,050	69.69	463,196,812	101.73	328,343,301	0	0	0	0	0	66.41	122.09	99.56	92.64	135.65	20.02			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	N/A	1	100,000,000	0	-	1	70,714,800	1	90,000,000	2	1,195,000,000	1	100,000,000	0	0	1	213,320,250	2	89,907,712	8	71,002,236	0	0	0	0	0	100.00	301.66	200.00	99.90	400.00	5.94			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	15,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	6,000,000	3	15,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	4800	120,000,000	0	-	4500	55,000,000	4600	100,000,000	4700	110,000,000	4800	120,000,000	0	0	3083	9,147,500	1726	19,136,600	5352	17,357,160	0	0	0	0	0	68.51	16.63	37.52	19.14	113.87	15.78			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	N/A	2600	85,000,000	0	-	2500	69,999,500	2500	85,000,000	2500	85,000,000	2600	85,000,000	0	0	2500	69,999,500	3000	84,998,500	0	9,794,475	0	0	0	0	0	100.00	100.00	120.00	100.00	0.00	11.52			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaraan Bermotor	N/A	4	20,000,000	0	-	0	-	0	-	4	8,000,000	4	20,000,000	0	0	0	-	0	-	0	7,155,120	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.44			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	N/A	1	15,000,000	0	-	0	-	0	-	1	5,000,000	1	15,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	N/A	7	200,000,000	0	-	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	0	0	7	199,146,000	7	249,527,000	7	199,787,000	0	0	0	0	0	100.00	99.57	100.00	124.76	100.00	99.89			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	20	30,000,000	0	-	5	8,598,400	10	25,000,000	15	25,000,000	20	30,000,000	0	0	1	1,995,800	10	19,627,000	15	19,217,310	0	0	0	0	0	20.00	23.21	100.00	78.51	100.00	76.87			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	3	15,000,000	0	-	0	-	0	-	2	6,000,000	3	15,000,000	0	0	0	-	0	-	2	4,030,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	67.17			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	N/A	70	800,000,000	0	-	0	-	0	-	65	800,000,000	70	800,000,000	0	0	0	0	0	-	40	525,597,699	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54	65.70			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	N/A	2	200,000,000	0	-	0	-	0	-	2	200,000,000	2	200,000,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	N/A	100	200,000,000	0	-	0	-	0	-	100	200,000,000	100	200,000,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sub Bagian Umum dan Aparatur	

Memawah, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Memawah



Drs. ASWIN AS.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 198903 1 007

**Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026**

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup				34.332.468.737		36.498.229.733	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0	100	350.000.000	100	350.000.000	100
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (KLHS)	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	70	80	375.000.000	85	375.000.000	85
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	80	90	300.000.000	95	300.000.000	95
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	55	65	75.000.000	70	75.000.000	70
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	80	81	918.750.000	82	964.687.500	82
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80	81	918.750.000	82	964.687.500	82
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.75	4.82	918.750.000	4.89	964.687.500	4.89
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	60	70	105.000.000	75	105.000.000	75
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Fasilitasi Penyimpanan sementara Limbah B3	65	75	60.000.000	80	60.000.000	80
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	70	80	45.000.000	85	45.000.000	85
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	75	85	120.000.000	90	120.000.000	90
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	15	20	120.000.000	20	120.000.000	55
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	9	50.000.000	10	50.000.000	34

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15	20	50.000.000	20	50.000.000	55
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	60	559.250.000	60	584.712.500	60
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	0	30	559.250.000	35	584.712.500	35
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100	125	509.250.000	150	534.712.500	375
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0	1	30.000.000	1	30.000.000	2
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	70	80	50.000.000	85	50.000.000	85
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2	2	50.000.000	2	50.000.000	6
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	70	80	50.000.000	85	50.000.000	85
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6	5	30.000.000	4	30.000.000	15
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	26,81	27	7.009.219.921	28	7.359.680.917	28
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten Mempawah	26.81	27	7.009.219.921	28	7.359.680.917	28

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1	1.417.500.000	1	1.488.375.000	1
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9091	10363	5.591.719.921	11814	5.871.305.917	11814
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	70	80	18.130.248.816	85	18.694.148.816	85
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	90	91	46.000.000	92	49.000.000	92
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	7.500.000	1	8.000.000	1
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	6.000.000	1	6.500.000	1
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.500.000	1	5.000.000	1
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	6.000.000	1	6.500.000	1
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.500.000	1	5.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	17.500.000	2	18.000.000	2
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100	100	6.366.248.816	100	6.367.648.816	100
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	75	6.311.148.816	75	6.311.148.816	75
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	24	31.600.000	24	32.000.000	24
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	17.000.000	1	17.500.000	1
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	6.500.000	13	7.000.000	13
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	65	70	12.500.000	80	13.000.000	80
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	6	12.500.000	6	13.000.000	6
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	95	95	125.000.000	96	127.000.000	96
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	15	65.000.000	15	67.000.000	15
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	95	95	209.500.000	96	224.000.000	96

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	11.000.000	1	12.000.000	1
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	22.000.000	2	23.000.000	2
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	17.000.000	1	19.000.000	1
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32.500.000	1	33.000.000	1
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	1	70.000.000	1	75.000.000	1
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41	2	7.000.000	2	7.000.000	2
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	75	76	3.330.000.000	77	3.355.000.000	77
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	150.000.000	2	170.000.000	2
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	10	100.000.000	10	100.000.000	10
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	10	80.000.000	10	85.000.000	10
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	93	7.560.000.000	95	8.062.000.000	95
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	7.500.000.000	3	8.000.000.000	3

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	60.000.000	12	62.000.000	12
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	93	481.000.000	95	496.500.000	95
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	45	80.000.000	45	85.000.000	45
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	13	11.000.000	23	14.500.000	33
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	10.000.000	12	12.000.000	12
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	45	50	6.365.000.000	55	7.545.000.000	55
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ	0	100	450.000.000	100	450.000.000	100
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	1	200.000.000	1	200.000.000	2
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	1	200.000.000	1	200.000.000	2
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70	72	3.500.000.000	74	4.600.000.000	74
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	4	500.000.000	5	600.000.000	9
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9797	160	2.000.000.000	210	2.500.000.000	10167
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	168	170	1.000.000.000	172	1.500.000.000	172
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	65	70	600.000.000	75	650.000.000	75
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2	3	600.000.000	3	650.000.000	3
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	70	72	40.000.000	73	40.000.000	73
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30	40	865.000.000	55	875.000.000	55
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1	500.000.000	1	500.000.000	2
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	3	50.000.000	3	60.000.000	3
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4800	1000	30.000.000	1000	30.000.000	6800

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2600	1600	50.000.000	1600	50.000.000	5800
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	1	25.000.000	1	25.000.000	1
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7	8	150.000.000	8	150.000.000	8
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	30	34	270.000.000	36	270.000.000	36
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2
2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	0	4	30.000.000	4	30.000.000	8
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	2	30.000.000	2	30.000.000	2
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	4	30.000.000	4	30.000.000	8
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengolahan Parkir Pada Kabupaten/Kota	75	78	90.000.000	80	90.000.000	80
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0	2	50.000.000	2	50.000.000	4
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	2
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum yang Melayani Trayek di Dalam Kabupaten/Kota	70	71	550.000.000	72	570.000.000	72
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	4	350.000.000	4	370.000.000	4